

Buku Saku RPJMD 2018-2023

SOSIALISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | kabupaten
Belitung

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2023 telah ditetapkan. Hal ini merupakan hasil kerja sama semua stake holder yang ada di Kabupaten Belitung

Dalam Rangka Pelakanaan Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu adanya Buku Saku RPJMD merupakan ringkasan dari Dokumen Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 yang hanya memuat kisi-kisi dari sekian banyak rumusan perencanaan pembangunan daerah.

Isi dalam buku saku RPJMD ini tidak dapat menampung semua sistematika dari penulisan Dokumen RPJMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi hanya mengutip sebagian dari dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Untuk lebih mendalami dan memahami secara keseluruhan tentang RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 kiranya, kepada seluruh stake holder untuk dapat membaca keseluruhan dari dokumen tersebut dan dibisa diakses melalui website pemerintah Kabupaten Belitung atau datang langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Belitung

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tanjungpandan, November 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Salman Alfarisi, SSTP
NIP. 197809151996121001

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaannya diawali dengan penyusunan perencanaan melalui siklus perencanaan pembangunan. Pada perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan dan hakekat dari pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat terwujud, diperlukan suatu perencanaan yang terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 adalah

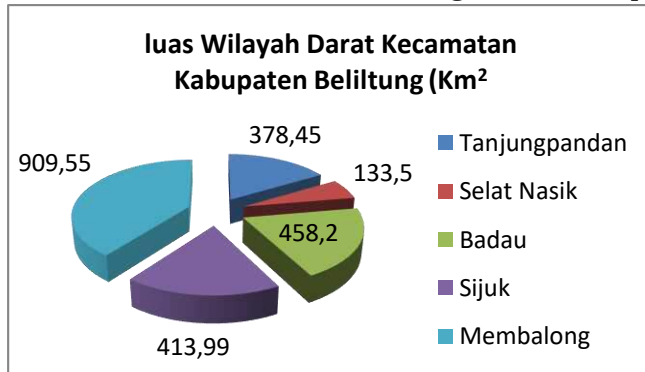
1. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Mewujudkan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai evaluasi;
3. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih terintegrasi, terarah, terinci, terpadu dan terukur dalam periode waktu 5 (lima) tahun;
4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.
5. Merumuskan indikator program beserta indikator kinerja untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Kabupaten Belitung dengan luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², terdiri dari daratan dengan luas 2.293,69 km². Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08'-107°58' BT dan 02°30'-03°15' LS, dengan batas wilayah meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

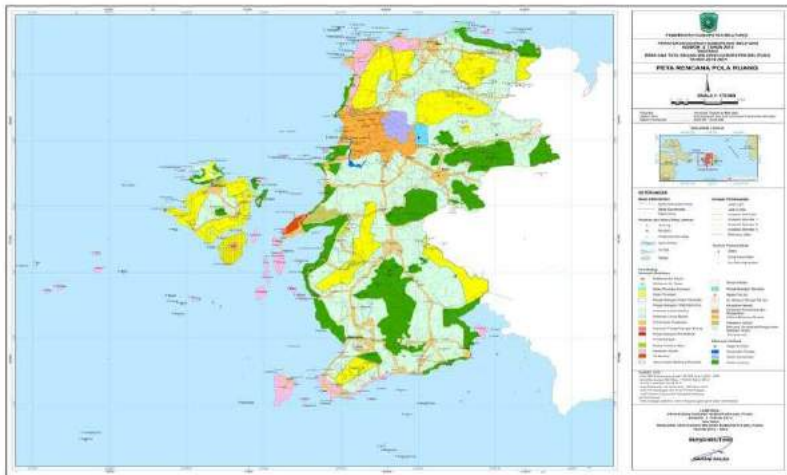


Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 100 buah pulau besar dan kecil.

Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, disamping itu masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu



POLA RUANG KABUPATEN BELITUNG



Kawasan Lindung

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Hutan Konservasi
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Rawan Bencana Alam
- Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan Budidaya

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
- Kawasan Peruntukan Pertanian
- Pengembangan kegiatan peternakan
- Kawasan Peruntukan Perikanan
- Kawasan Minapolitan
- Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Peruntukan

Kawasan Strategis

- Kawasan strategis provinsi
- Kawasan Strategis Kabupaten

Demografi



no	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk	152.257	152.853	156.892	161.706	165.466
2	Komposisi menurut Jenis Kelamin:	78.023	78.086	79.704	82.197	83.976
		74.234	74.767	77.188	79.509	81.490
3	Sex ratio	105,10	104,44	103,26	103,38	103,05
4	Pertumbuhan(%)	0,50	0,39	2,64	3,07	2,33
5	Tingkat Kepadatan (km2)	66,38	66,64	68,40	70,50	72,14



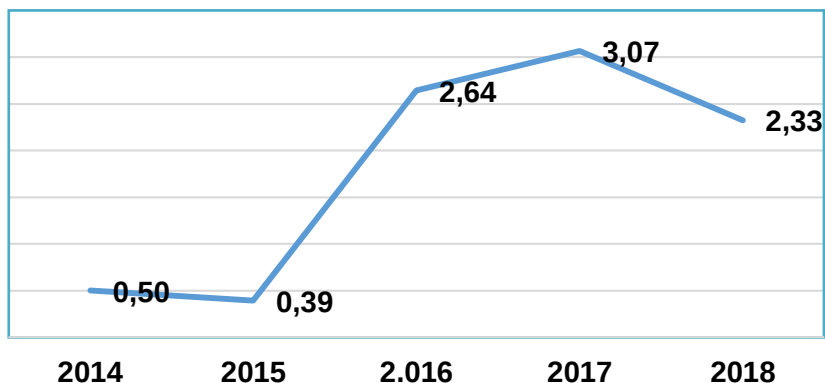
Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung cenderung mengalami peningkatan dari 0,50 % di tahun 2014 menjadi 3,07 % pada tahun 2017. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 2,32%. Peningkatan jumlah

penduduk dari tahun ke tahun di Kabupaten Belitung dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor tingginya angka kelahiran yang disebabkan karena tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat fertilitas / kelahiran maupun mortalitas / kematian penduduk Kabupaten Belitung dan faktor demografis yang menyebabkan tingginya arus migrasi yang masuk ke Kabupaten Belitung

**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung
Per Kecamatan Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jml Desa/ Kel	Luas Daerah (km ²)	Penduduk (jiwa)			Kepada- tan Pendud- uk (jiwa / km ²)
				Laki- Laki	Perempua- n	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Membalong	12	909,550	12.697	11.944	24.641	27,091
2	Tanjungpandan	16	378,448	46.328	45.891	92.219	243,677
3	Badau	7	458,200	7.134	6.672	13.806	30,131
4	Sijuk	10	413,992	13.770	14.131	28.901	69,811
5	Selat Nasik	4	133,500	3.047	2.852	5.899	44,187
	Jumlah	49	2.293,690	83.976	81.490	165.466	72,140

**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung
Tahun 2014-2018**



*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Belitung Tahun 2019 (diolah)*

Grafik diatas menyatakan bahwa penduduk di Kabupaten Belitung pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,33% dari tahun sebelumnya yang sempat mencapai 3,07% . Di tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung sempat turun sebesar 0,11% dari semula 0,50% menjadi 0,39%. Dengan angka pertumbuhan penduduk yang mencapai lebih dari 2% selama tiga tahun terakhir, maka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung dapat dikategorikan “cepat” dengan kecenderungan peningkatan yang melambat.

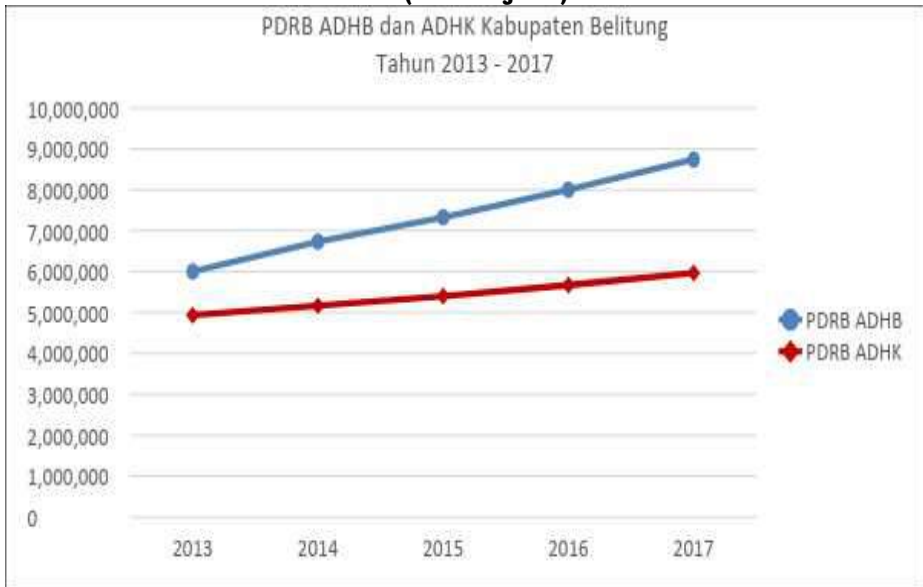




Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Belitung Tahun 2013 - 2017 (dalam juta)

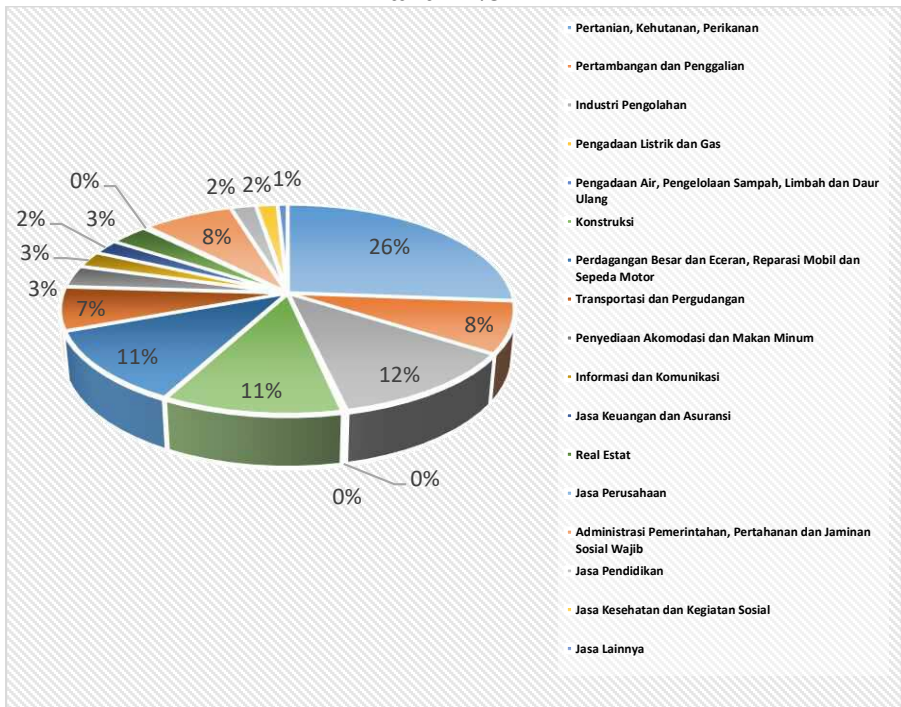


Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2018

Berdasarkan diagram di atas terlihat adanya peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang cukup signifikan, dari Rp. 6,0 triliun pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 8,7 triliun pada tahun 2017, yang berarti struktur perekonomian Kabupaten Belitung terus meningkat. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada besaran yang relatif stabil, yaitu Rp. 4,93 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 5,97 triliun pada tahun 2017, yang berarti

pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Belitung cenderung berjalan lambat.

Kontribusi Sektor Pembentuk PDRB ADHB Kabupaten Belitung Tahun 2017

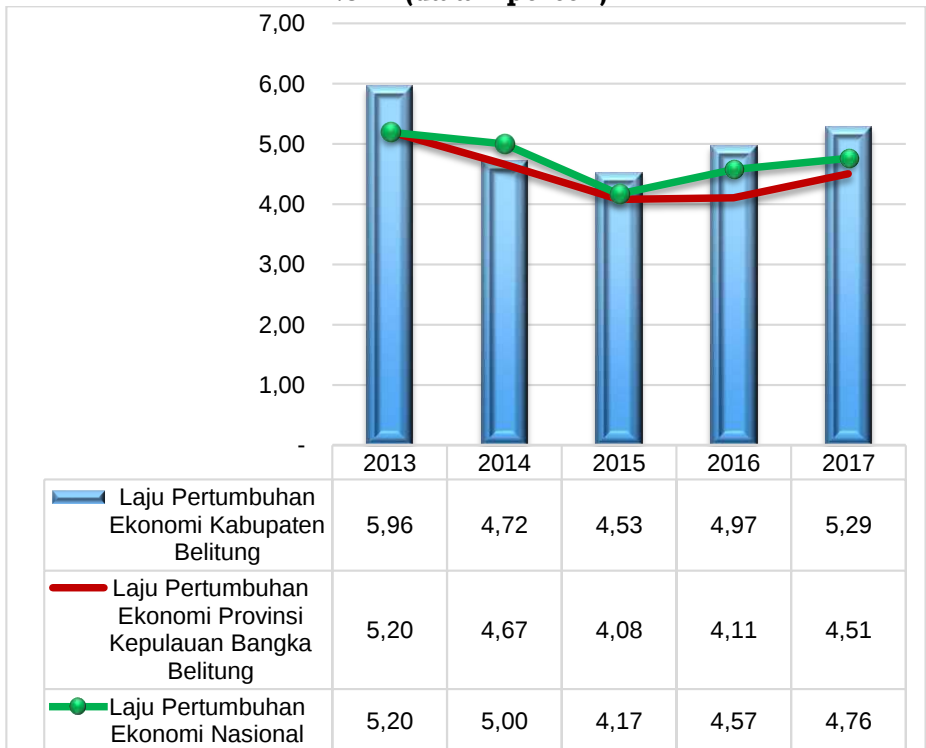


Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2018

Berdasarkan tabel nilai dan kontribusi PDRB ADHB di atas, terlihat bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, namun kontribusinya bersifat fluktuatif dari 26,32% tahun 2013 menjadi 26,22% pada tahun 2017

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013 – Tahun 2017 (dalam persen)

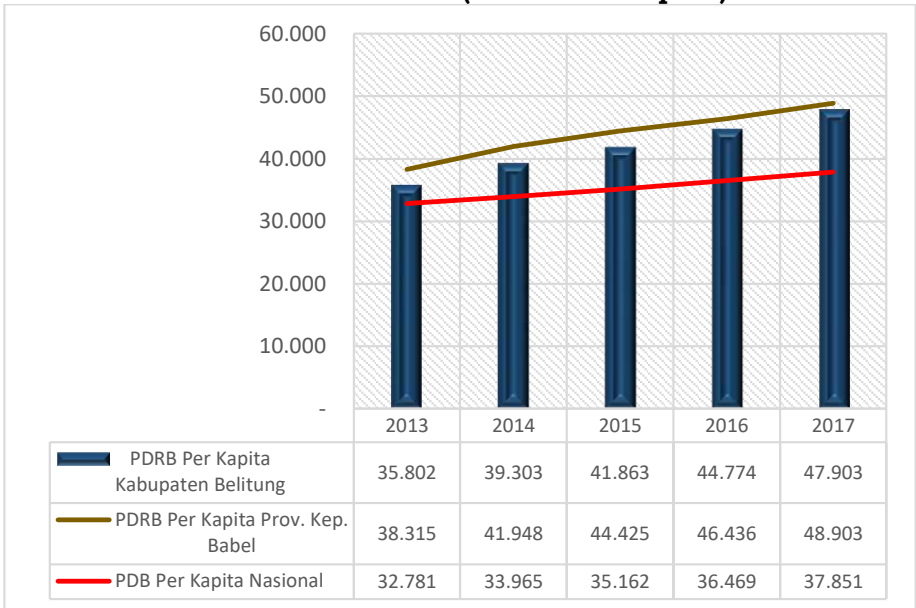


Sumber : BPS, 2018

Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Kepulauan Bangka Belitung maupun di Indonesia

Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013 – 2017 (dalam ribu rupiah)



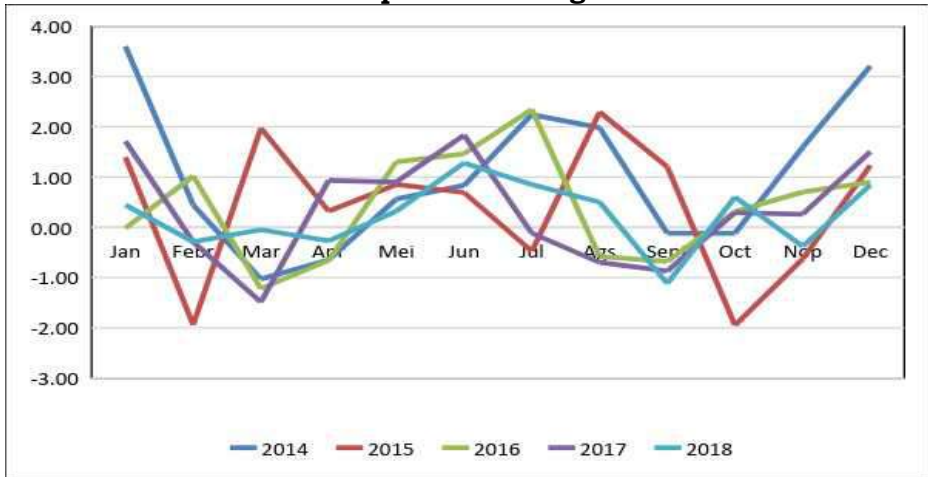
Sumber : BPS, 2018 (diolah)



Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Belitung mengalami peningkatan menjadi Rp. 47.903.000,- pada tahun 2017 dari Rp. 32.803.000,- pada tahun 2013. Rata-rata peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Belitung adalah 8,33% per tahun.

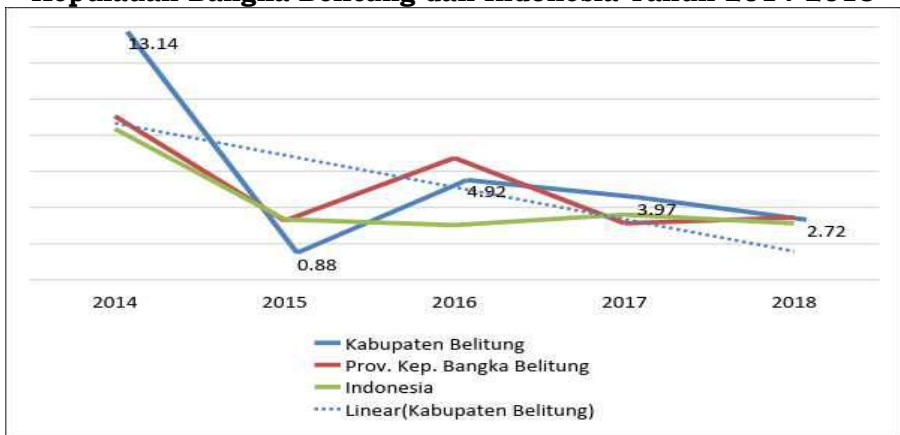
Laju Inflasi

Inflasi Bulanan Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018



Secara umum, Tanjungpandan mengalami kenaikan inflasi pada bulan-bulan tertentu sepanjang tahun 2014-2018. Walaupun masih bersifat *seasonal*, tindakan nyata pemerintah dalam mengendalikan inflasi tetap diperlukan meskipun inflasi di Kabupaten Belitung masih berada di bawah inflasi nasional yang pada tahun 2018 sebesar 2,72%

Perbandingan Laju Inflasi di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2014-2018

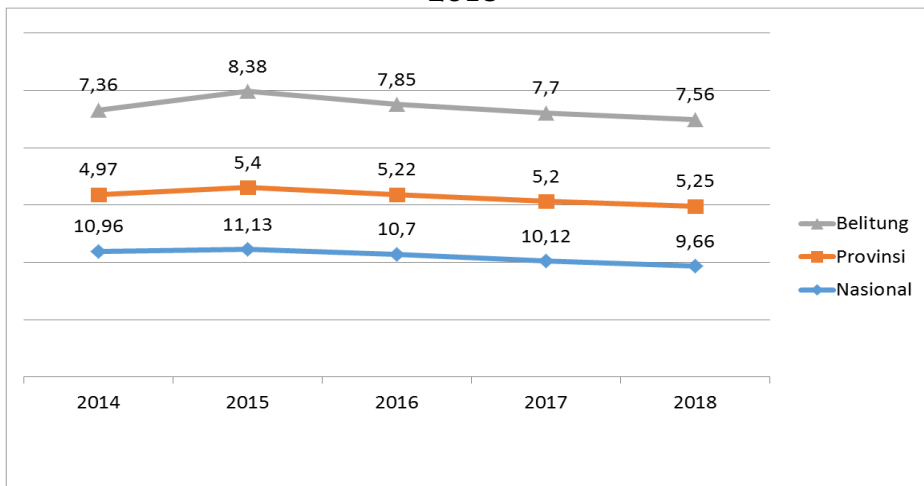


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)



Tingkat Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah, persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Besaran persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir pada tahun 2014-2018 menggambarkan data persentase kemiskinan berdasarkan data SUSENAS yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun jika dibandingkan dengan capaian persentase kemiskinan Nasional, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih berada di bawah persentase kemiskinan nasional

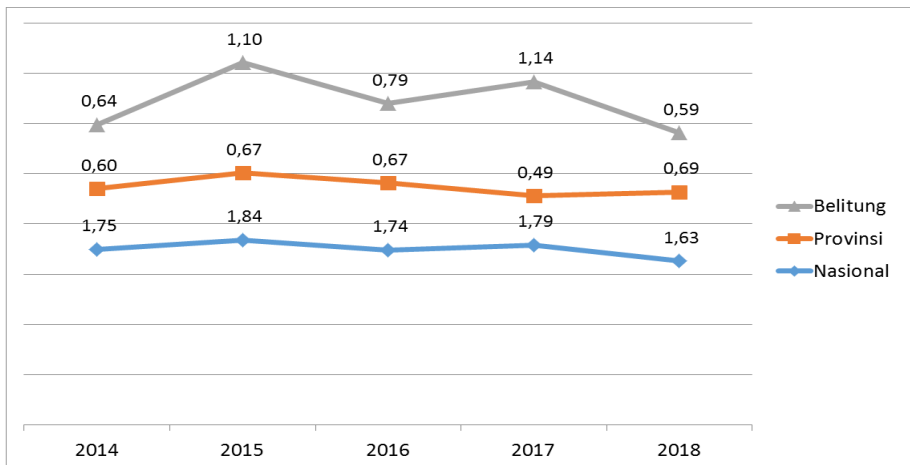
Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Garis kemiskinan di Kabupaten Belitung pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan sama halnya dengan garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, namun garis kemiskinan di Kabupaten Belitung pada tahun 2014-2018 masih berada di atas garis kemiskinan provinsi dan nasional

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

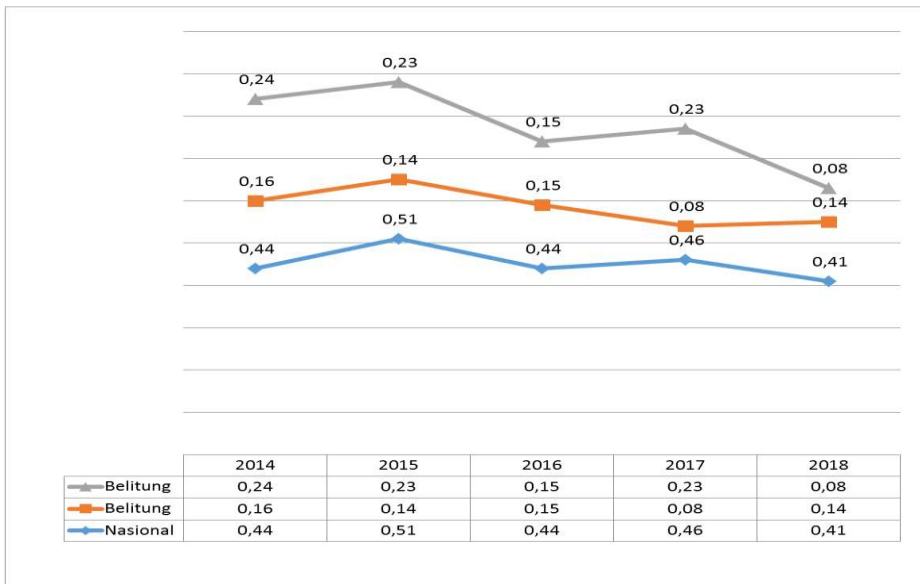


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)



Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada grafik di atas menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin semakin meluas.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

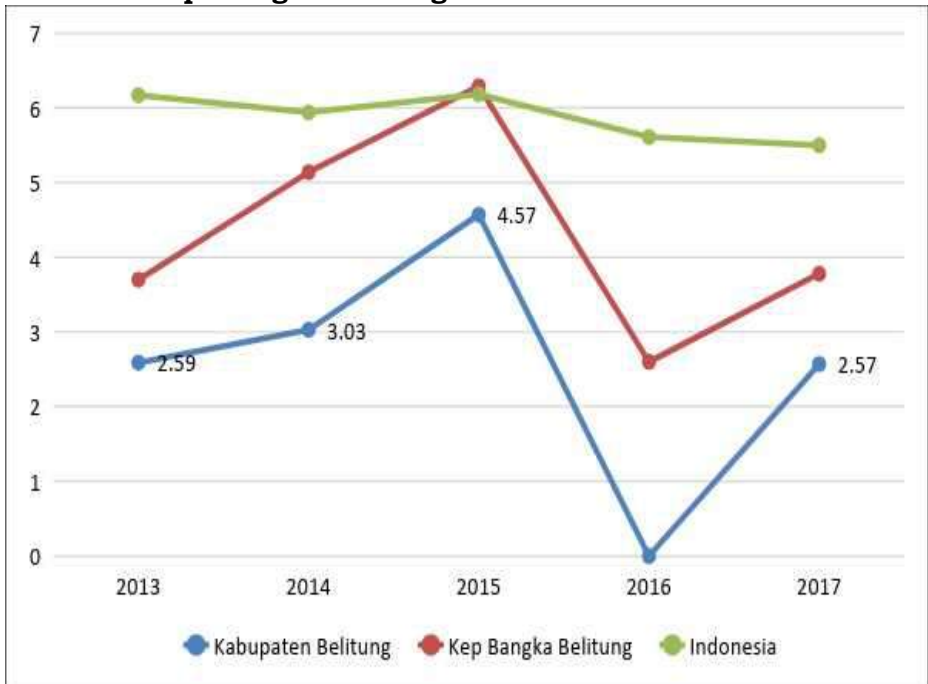


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

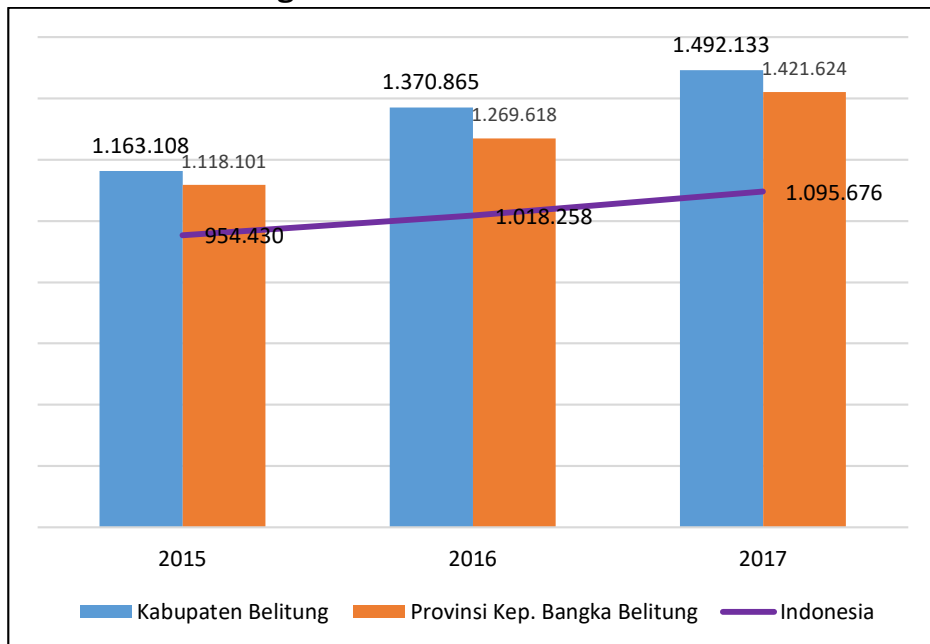
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belitung, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2013-2017



terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung masih berada di bawah provinsi dan nasional, dengan peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2013-2015, dari 2,59 menjadi 4,57. Pola serupa terjadi di provinsi Kep. Bangka Belitung yang juga mengalami kenaikan di tiga tahun pertama.

**Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (dalam rupiah)
Penduduk Di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dan Indonesia Tahun 2015-2017**



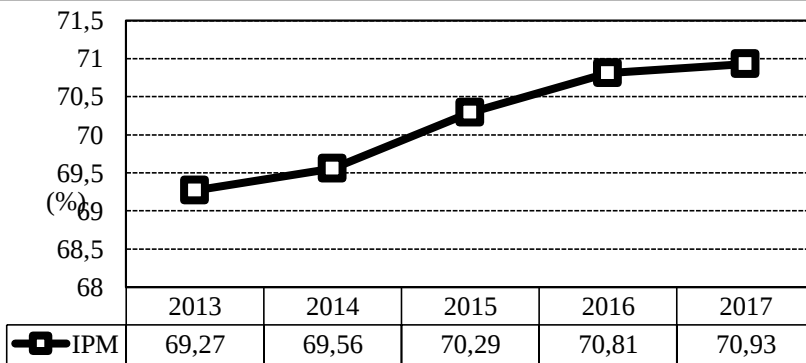
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)





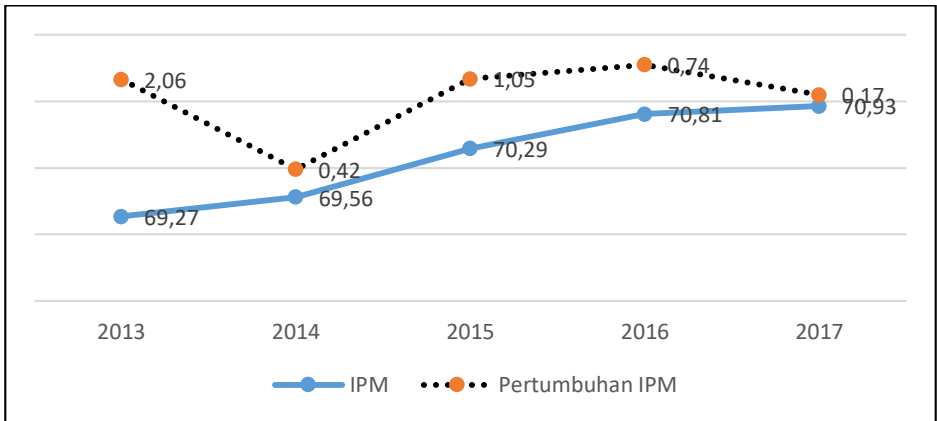
Kesejahteraan Sosial

**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung
Tahun 2013-2017**



. Dengan capaian IPM tersebut maka Kabupaten Belitung berada pada kelompok status pembangunan manusia “tinggi” bersama-sama dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017



Berdasarkan nilai setiap komponen penyusun IPM Kabupaten Belitung di atas, maka dapat disimpulkan bahwa IPM Kabupaten Belitung cenderung naik melambat. Jadi, meskipun nilai IPM meningkat setiap tahunnya, tapi capaian pertumbuhan IPM itu sendiri justru mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan IPM yang hanya 0,17% pada tahun 2017, kemudian 0,74% di tahun 2016 dan 1,05% di tahun 2015. Demikian juga perbandingan nilai setiap komponen penyusun IPM yang meningkat namun tidak terlalu signifikan.

Pendidikan



Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belitung Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata Lama Sekolah	8,02	8,07	8,09	8,10	8,11

Sumber : BPS Provinsi Babel 2018

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Kualitas modal manusia juga dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif (15 tahun ke atas). Semakin tinggi RLS di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik sehingga produktivitas perekonomian daerah juga bisa meningkat

Angka Melek Huruf Tahun 2013-2017

Angka Melek Huruf (%)	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
	97,65	98,68	98,86	97,35	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik



Angka melek huruf di Kabupaten Belitung tahun 2016 sebesar 97.35 % yang artinya masyarakat di Kabupaten Belitung hampir semua dapat membaca dan menulis selain itu indikator di atas juga menunjukkan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat didalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SM Tahun 2014-2018

No	APM Jenjang Pendidikan (%)	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD	98,65	99,80	107,34	108,95	99,59
2.	SMP	88,33	87,77	100,15	81,69	79,92

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2019

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 99,59 % dari 108,95% pada tahun 2017, hal tersebut disebabkan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan usia anak sekolah untuk duduk sekolah jenjang SD yaitu usia 7 tahun sampai dengan usia 12 tahun, namun masih terdapat anak SD yang berusia lebih dari usia yang telah ditetapkan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD dan SMP Tahun 2014-2018

No	Angka Partisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan (%)	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD	98,65	99,79	98,89	99,64	99,59
2.	SMP	86,16	71,82	97,86	82,63	97,41

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tahun 2019



APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kabupaten Belitung selama periode 2014-2018.

Kesehatan



Angka Kematian Bayi Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kasus Kematian Bayi	AKB Kab Belitung per 1.000 KH
1.	2014	3.332	43	13
2.	2015	3.100	35	11
3.	2016	3.155	33	10
4.	2017	2.887	29	10
5.	2018	3.048	37	12,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Tahun 2019



Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain.

Penyebab kematian terbesar dari tahun ke tahun adalah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), *asfiksia* (keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas dengan teratur dan spontan), yang disebabkan karena *prematuritas* sehingga organ belum matang atau belum siap bertahan hidup serta kematian disebabkan kelainan kongenital dan kelainan bawaan

Angka Kematian Ibu Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kasus Kematian Ibu	AKI Kab. Belitung per 100.000 KH
1.	2014	3.332	4	120
2.	2015	3.100	3	97
3.	2016	3.155	4	127
4.	2017	2.887	6	208
5	2018	3.048	6	196

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Tahun 2019



Dari tabel tersebut menggambarkan masih terjadi kasus kematian ibu yang disebabkan karena kasus pendarahan dan *eclampsia* pada ibu hamil, Hamil di luar kandungan serta adanya risiko tinggi ibu hamil seperti penyakit hipertensi.

Status Gizi Balita

Status Gizi Balita di Kabupaten Belitung Tahun 2015 – 2017

No	Masalah Gizi	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Underweight	14.4	7.3	15.7
2	Stunting	23.3	18.9	27.6
3	Wasting	5.8	4.0	7.7

Status gizi balita diukur berdasarkan indikator umur, berat badan (BB), dan tinggi badan/panjang badan (TB/PB). Variabel BB dan TB/PB balita disajikan dalam bentuk tiga indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB.

Karakteristik masalah gizi di Kabupaten Belitung pada tahun 2017 yaitu akut-kronis. Masalah gizi akut-kronis adalah masalah gizi yang memiliki sifat masalah gizi akut dan kronis. Masalah gizi bersifat kronis berdasarkan indikator TB/U sebagai akibat dari keadaan berlangsung lama. Misalnya: kemiskinan, perilaku hidup tidak bersih dan sehat, dan asupan makanan kurang dalam jangka waktu yang lama sejak usia bayi, bahkan semenjak janin sehingga menyebabkan anak menjadi pendek. Sedangkan masalah gizi bersifat akut berdasarkan indikator

BB/U sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kelaparan yang mengakibatkan anak menjadi kurus.

BB/U sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kelaparan yang mengakibatkan anak menjadi kurus.

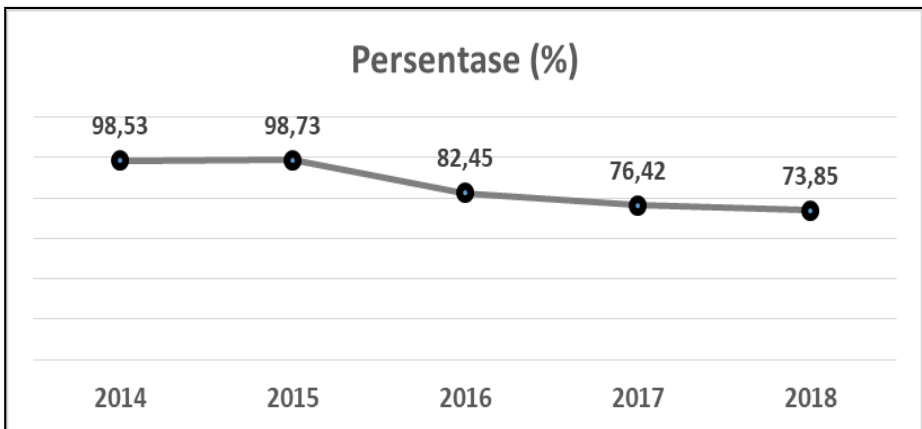


BB/U sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kelaparan yang mengakibatkan anak menjadi kurus.

Kesejahteraan sosial



**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial
Tahun 2014-2018**



Sumber data : Dinas PPPAS Kabupaten Belitung Tahun 2019

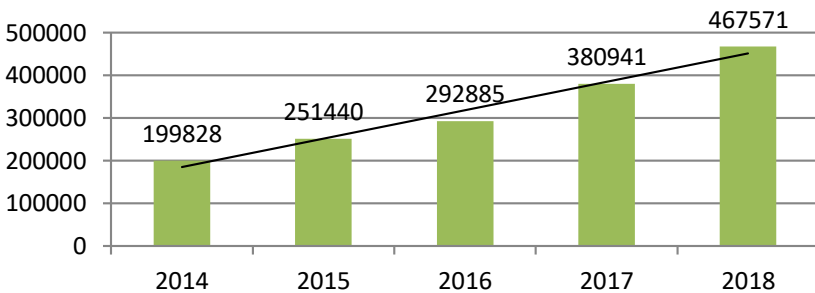
Penanganan PMKS pada tahun 2017 mengalami penurunan yang disebabkan oleh terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Belitung sehingga penanganan korban pasca bencana banjir di Kabupaten Belitung yang mempengaruhi jumlah PMKS yang harus ditangani belum terdata sebagai korban bencana banjir pada PMKS Kabupaten Belitung

Daya Saing Daerah

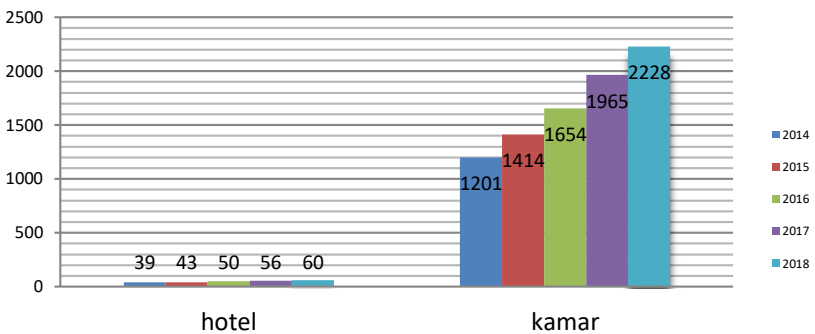
Pariwisata



Kunjungan wisata



JUMLAH HOTEL DAN JUMLAH KAMAR





JALAN

Tahun	Prosentase (%) Jalan Kondisi Baik
(1)	(2)
2014	76,66
2015	79,09
2016	67,69
2017	73,68
2018	76,45

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Tahun 2019

Jalan Negara = 103,37 Km;

Jalan Propinsi = 132,43 Km;

Jalan Kabupaten = 628,67 Km.

Jumlah Jembatan 108 (seratus delapan)

Total panjang Jembatan 1.017 (seribu tujuh belas) meter





Bandara Udara H.A.S HANANDJOEDIN

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pesawat Datang (kali)	2863	2.763	3.147	3.912	4.418
2	Pesawat Berangkat (orang)	2863	2.763	3.147	3.912	4.418
3	Penumpang Datang (orang)	267.526	316.643	350.010	434.361	489.121
4	Penumpang Berangkat Orang)	267.635	317.141	354.435	434.435	489.949

Sumber Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2018



Pelabuhan Penumpang Laskar Pelangi Kabupaten Belitung

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapal Datang	246	267	214	163	147
2	Kapal Berangkat	246	267	214	163	147

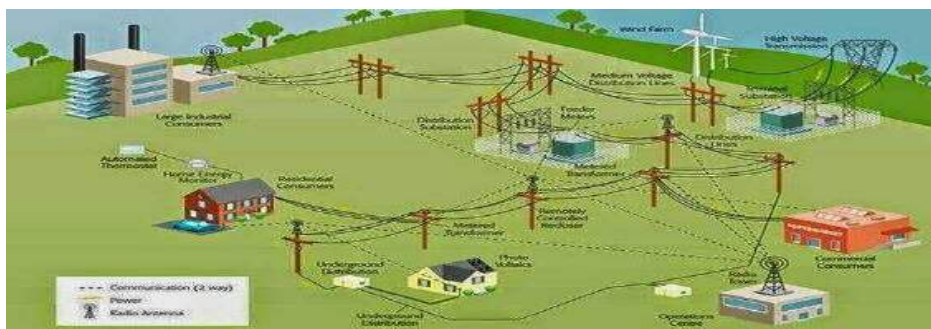
Sumber Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Tahun 2018



Jumlah Pelanggan dan Daya Tersambung Listrik di Kabupaten Belitung

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pelanggan (pelanggan)		77.360	82.230	53.443	94.039
2	Daya Terpasang (KW)		22.322	54.840	67.150	101.090
3	Rumah tangga pengguna listrik (pelanggan)		69.627	73.677	47.517	83.215

Sumber : BPS



Indeks Desa Membangun adalah Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks



Ketahanan Ekologi Desa yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa

dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

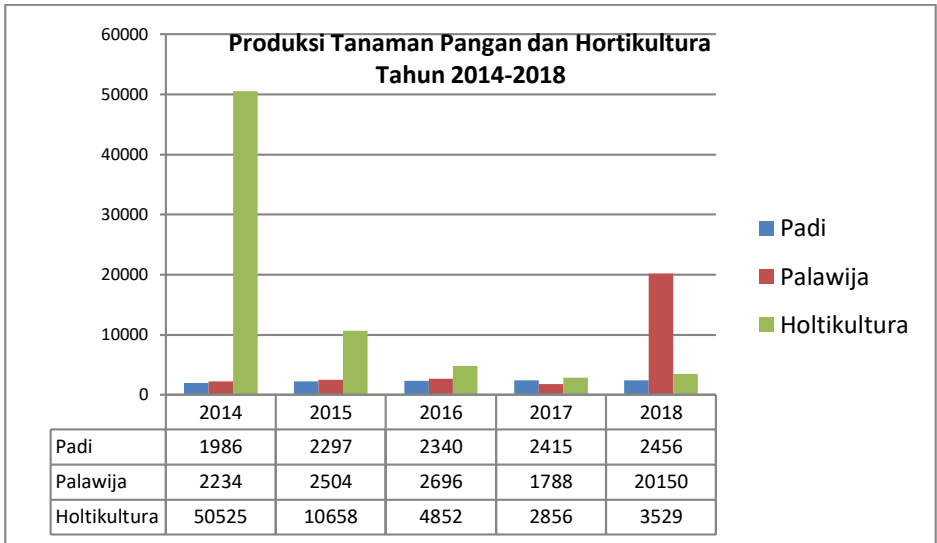
Jumlah Desa dengan Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung Tahun 2016-2017

Status IDM	Tanjung Pandan		Membalong		Selat Nasik		Sijuk		Badau	
	2016	2017	2016	2017	2016	2016	2016	2017	2016	2017
Sangat Tertinggal	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Tertinggal	1	0	5	1	3	0	5	0	5	0
Berkembang	6	6	6	10	1	4	4	5	1	6
Maju	2	3	0	1	0	0	0	5	0	1
Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber data: Dinas DPPKBPMK Kabupaten Belitung, 2019



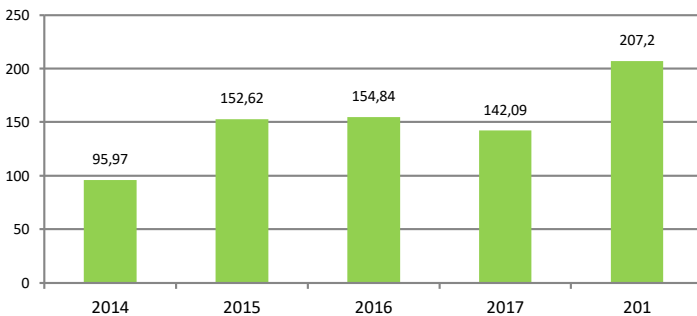
PERTANIAN



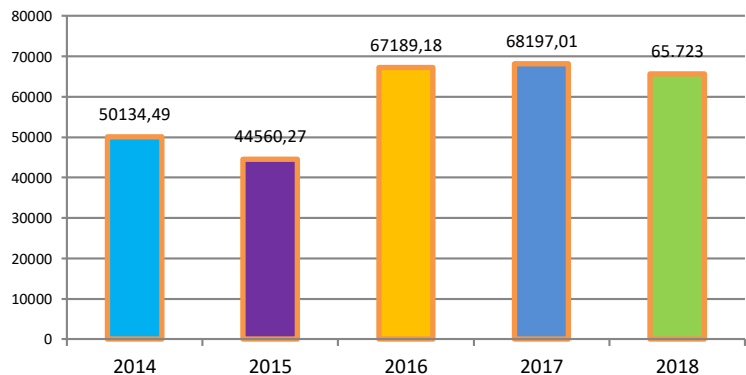
PERIKANAN



Produksi Perikanan Budi Daya (ton)



Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

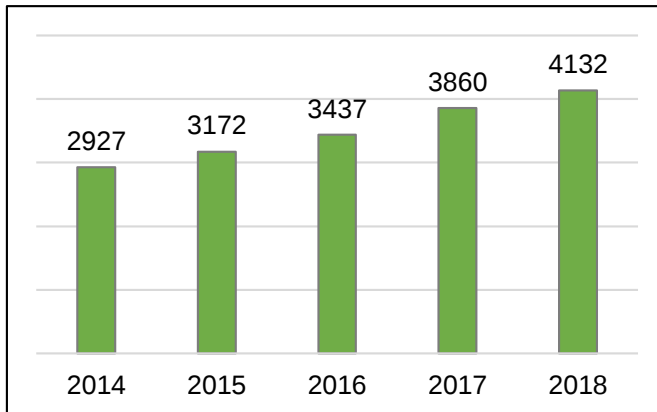
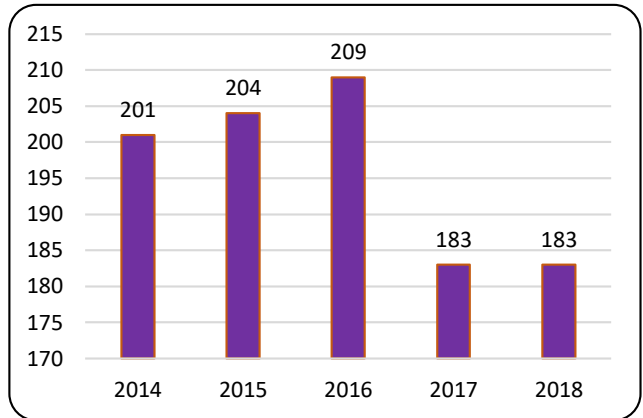


Koperasi dan usaha mikro

Pertumbuhan Koperasi di Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018 (Unit)



designed by freepik



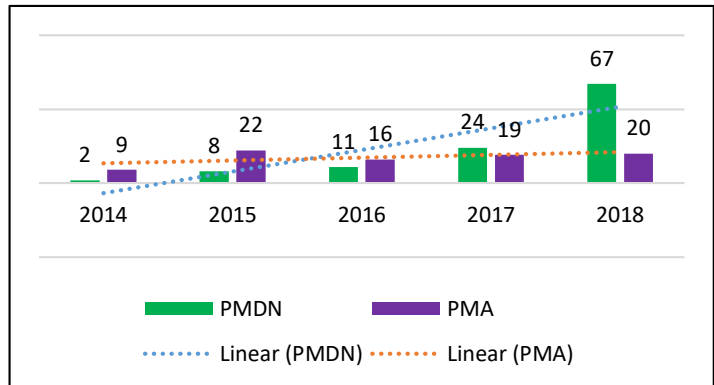
Perkembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Belitung, 2019

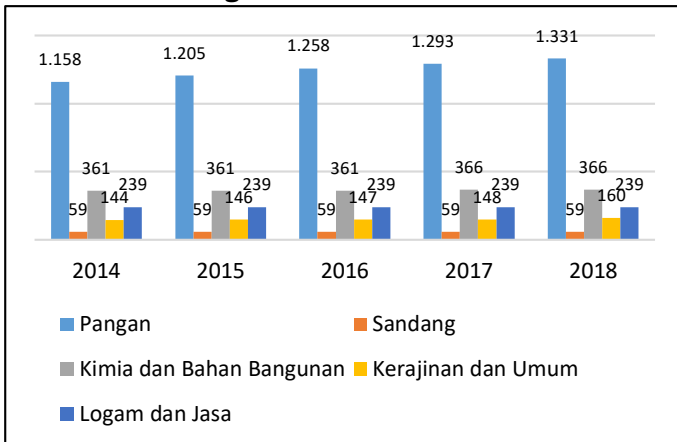


Investasi

**Jumlah Investor Berskala Nasional di
Kabupaten Belitung
Tahun 2014-2018**



Perkembangan Jumlah Industri Kecil Tahun 2014-2018 (Unit)





Lingkungan Hidup

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Lingkungan Hidup					
1	Kualitas Lingkungan Hidup	60,22	60,51	57,44	62,53	58,18
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	61,30	62,05	62,05	66,25	57,34
3	Hasil Pengukuran indeks kualitas Udara	90,39	90,61	80,40	94,97	89,40
4	Hasil Pengukuran indeks kualitas Tutupan Lahan	36,77	36,77	36,77	35,40	35,40
5	Timbulan sampah yang ditangani (Ton/Tahun)	27.718,39	24.166,21	25.269,39	28.984,80	26.092,17
6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	68,33%	68,77%	98,52%	80,00%	30,84%
7	Jumlah TPS 3R yang ada	5	5	8	10	11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2019



BIROKRASI

INDEK REFORMASI BIROKRASI



Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional

Indeks Reformasi Kabupaten Belitung Tahun 2018 adalah “B”



SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan

keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk

mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Nilai Sakip Kabupaten Belitung Tahun 2018 “CC”

OPINI BPK



Opini Badan Pemeriksa

Keuangan (disingkat **Opini BPK**) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Jenis Opini BPK

- Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
- **Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) BELITUNG Tahun 2018**
- Tidak wajar (adversed opinion)
- Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)



INDEKS PROFESIONAL

ASN Indeks

Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif

tingkat **profesionalitas** pegawai **ASN** yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan **profesionalisme ASN**

Indeks Profesional ASN Kabupaten Belitung tahun 2018 “62 ”

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT



(SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat **kepuasan masyarakat** yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat **masyarakat** dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

Nilai SKM Kab Belitung 76.81

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang

dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung mengalami *trend* meningkatkan tiap tahunnya, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 10.12 %. Pertumbuhan pada masing-masing pos penerimaan pendapatan mengalami pertumbuhan yang positif, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20.06 %, Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6.99%, dan Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-ain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,08 %.

kinerja Pelaksanaan APBD

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2013-2017

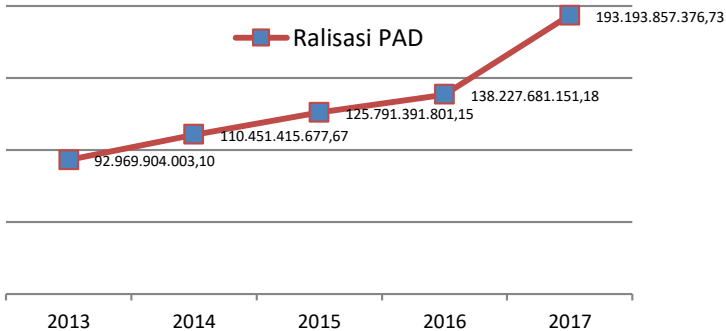
Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Rasio derajat Presentase Desentralisasi Fiskal
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	655.560.012.144,64	92.969.904.003,10	14,18
2014	775.515.159.747,83	110.451.415.677,67	14,24
2015	846.853.615.266,53	125.791.391.801,15	14,85
2016	911.305.568.117,31	138.227.681.151,18	15,16
2017	964.030.826.331,19	193.193.857.376,73	20,04

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)

Grafik Komposisi Pendapatan daerah

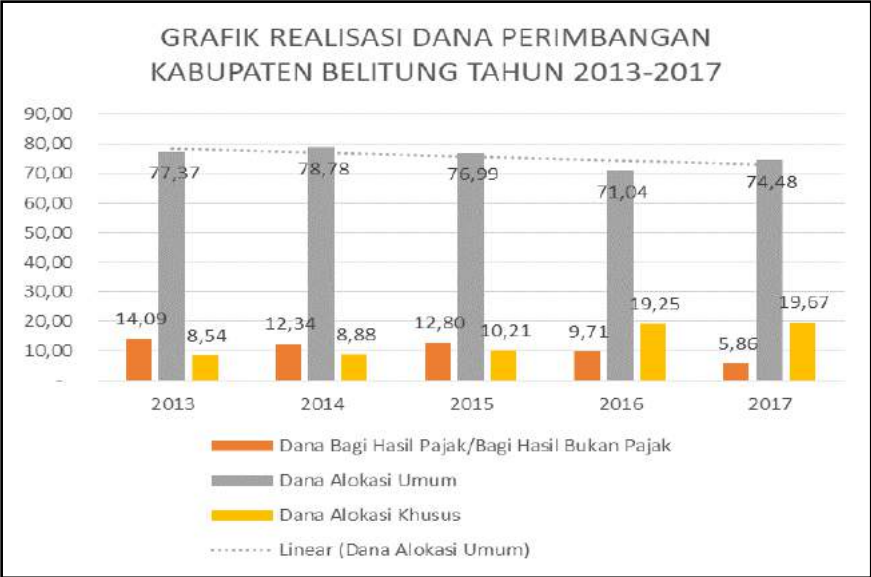


Ralisasi PAD tahun 2013-2017



Rata-rata pertumbuhan pajak daerah dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 20.04 %. Dari Komponen pajak daerah yang mengalami pertumbuhan tertinggi berasal dari pajak hotel sebesar 41,44% dan pajak parkir sebesar 34.41%, sedangkan rata-rata pertumbuhan pajak daerah terendah berasal dari pajak sarang burung walet dan PBB. Pajak yang berkontribusi terhadap rasio dan pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah melalui

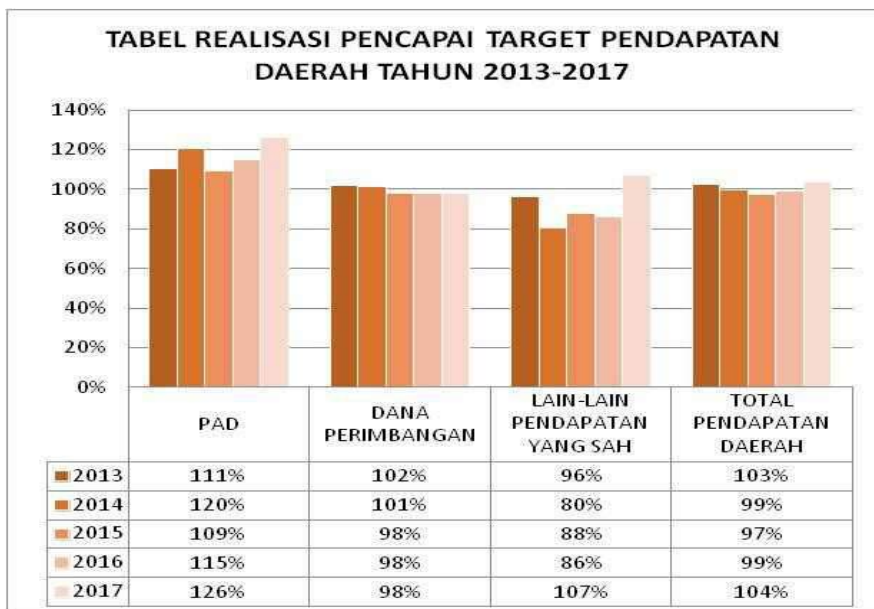
pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak BPHTB ke pemerintah daerah (kab/kota) tahun 2011 dan pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaaan Perkotaan (PBBP2) ke Pemerintah Daerah (kab/kota) tahun 2013, yang sebelumnya kedua objek pajak tersebut dikelola oleh pemerintah pusat melalui skema bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah (kab/kota). Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan 2 (dua) objek pajak tersebut, menyebabkan rasio pajak dan pertumbuhan pajak daerah serta rata-rata pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD meningkat.



**REALISASI LAIN-LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
TAHUN 2013-2017 (persen)**

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Hibah	-	-	-	3,89	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	29,34	23,14	28,39	21,84	35,18
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44,53	61,75	23,56	-	-
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	26,12	14,33	38,85	44,09	3,51
Pendapatan Lainnya	-	0,78	9,20	30,18	61,31

Sumber : BPKAD tahun 2018 (data diolah Tim RPJMD)



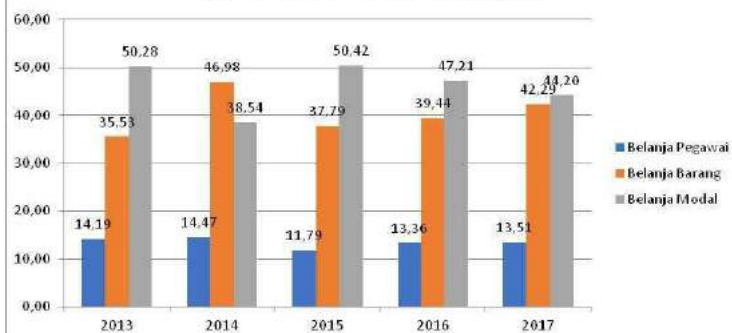
Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik, dan belanja tidak terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal

Belanja
Langsung



**GRAFIK PERSENTASE REALISASI BELANJA
LANGSUNG TAHUN 2013-2017**

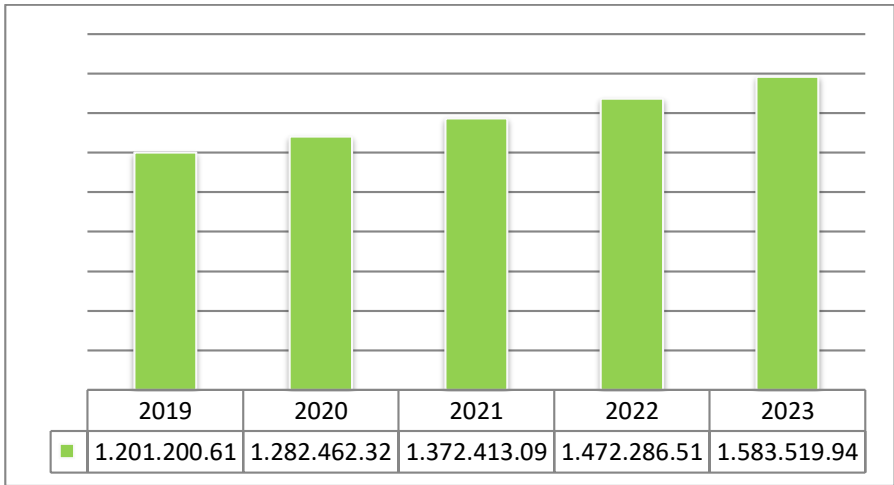


Pembiayaan Daerah



Proyeksi Pendapatan Daerah
2019-2023

Grafik Proyeksi Pendapatan Daerah



Berdasarkan Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10.12 %, dengan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20.06 %, Pos Dana Perimbangan rata-rata sebesar 6.99 % dan Pos Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang sah rata-rata sebesar 15.08 %. Berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah tahun 2014 sampai dengan 2017, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah tahun 2014 sampai dengan 2017, maka penerimaan pendapatan daerah tahun 2019-2023 diproyeksikan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9.40% % per tahunnya. Pendapatan Asli Daerah akan meningkat kondisinya dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar 16.43 % % per tahun. Dana Perimbangan juga akan terus meningkat kondisinya dengan rata-rata pertumbuhan 8.40 % per tahun dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3.72 % per tahun.

Untuk Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak /bukan pajak diprediksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.50 % pertahun. . Dana Alokasi Umum akan meningkat rata-rata sebesar 6.50 % pertahun dan Dana Alokasi Khusus akan meningkat 12%. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan DAU, maka proyeksi DAU yang ditetapkan dalam RPJMD ini bersifat dinamis atau tidak final, serta mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan penerimaan dalam negeri neto.

Sedangkan untuk jenis komponen pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; untuk Pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Kabupaten/Kota akan meningkat rata-rata sebesar 10 % per tahun, Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya rata-rata sebesar 4.50 % per tahun, dan Pos Pendapatan Lainnya akan meningkat 3,72%

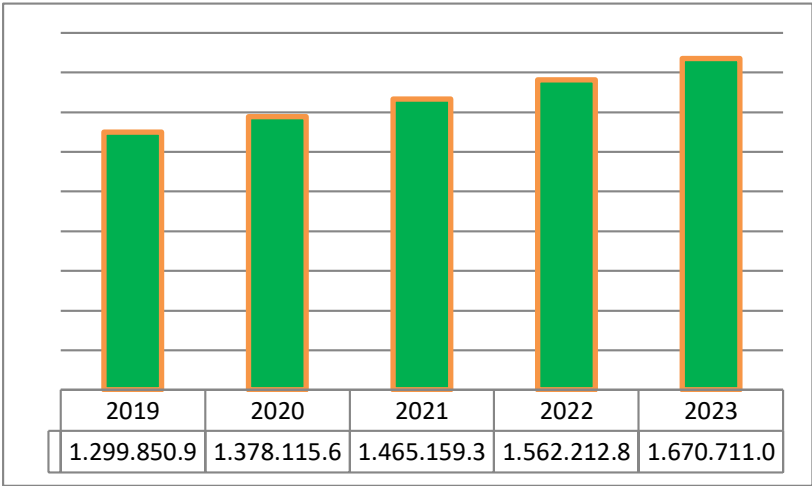
Proyeksi Belanja tahun 2019-2023

Berdasarkan Rata-rata pertumbuhan Belanja daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6.17 % pertahun, dengan pos belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan sebesar 9.99% sedangkan untuk belanja langsung mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3.42%

Berdasarkan pertumbuhan rata-rata belanja tahun 2014 sampai dengan 2017 dan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah

maka proyeksi Belanja Langsung sebesar 9.40% sedangkan belanja tidak langsung 4.58%

Grafik Proyeksi Belanja Tahun 2019-2023



Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis dianalisis berdasarkan kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah yang dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan dokumen perencanaan lainnya, hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan isu strategis dari perangkat daerah.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perbandingan dengan kabupaten sekitar, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Belitung, serta analisis kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah, Isu strategis Kabupaten Belitung pada pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Transparan dan Bertanggung Jawab

Isu tata kelola pemerintah yang bersih efektif, transparan dan bertanggung jawab berangkat dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, demokratis, dan terpercaya dalam upaya meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua.

2. Infrastruktur dan konektifitas yang mendukung perekonomian

Isu strategis infrastruktur dan konektifitas untuk mendukung perekonomian berangkat merupakan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik. Isu infrastruktur dan konektifitas berangkat juga dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan, dan menjamin seluruh penduduk untuk mendapat akses energi yang terjangkau dan dapat diandalkan, tersedianya infrastruktur yang tangguh, dan upaya penyediaan permukiman kota dan permukiman manusia

yang aman, tangguh dan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dimasyarakat.

3. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah

Isu Strategis Peningkatan Ekonomi kerakyatan merupakan perwujudan dari upaya pemerintah untuk menghapus kemiskinan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak. Peningkatan Ekonomi kerakyatan dengan menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah dalam upaya peningkatan produktifitas masyarakat yang mempunyai daya saing dipasar internasional

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan produktif

Isu Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan produktif juga berangkat dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat meningkatkan produktifitas rakyat untuk menjamin kehidupan masyarakat yang sehat, menjamin pendidikan yang adil dan inklusif, meningkatkan kesempatan belajar, mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, menghapus segala bentuk kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat, serta upaya untuk melakukan revolusi karakter bangsa.

5. Kabupaten Belitung sebagai kawasan strategis

Isu Kabupaten Belitung sebagai kawasan Strategis diangkat suatu peluang yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah. Tema Pembangunan wilayah sumatera yang ditetapkan didalam RPJMN yaitu Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan, merupakan suatu peluang yang harus diambil dalam upaya percepatan pembangunan. Pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN) sesuai dengan potensi daerah Kabupaten Belitung.

6. Lingkungan hidup berkesinambungan

Isu strategis lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi

“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”

Visi merupakan cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung akan dibawa, diarahkan dan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

Ekonomi Berkeadilan

- bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;

Berdaya saing

- bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;

Inovatif

- bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai

Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya

Misi Kesatu

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan

Misi Kedua

- Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.

Misi Ketiga

- Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penjelasan Misi:

Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Disamping itu perlu pula percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global.

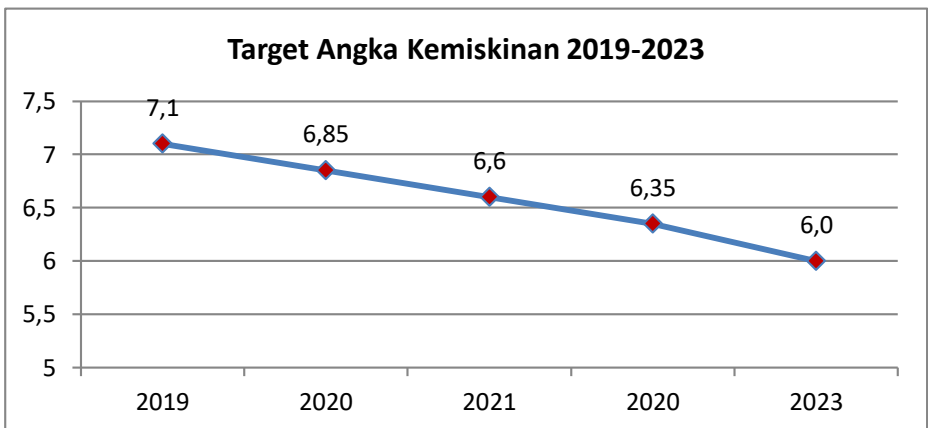
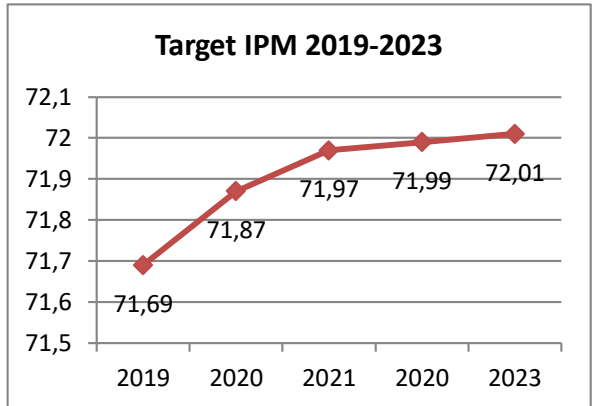
Tujuan

Tujuan secara normatif merupakan bentuk penjabaran dari pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang ada.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Misi Kesatu
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, akan diwujudkan dengan tujuan sebagai berikut :

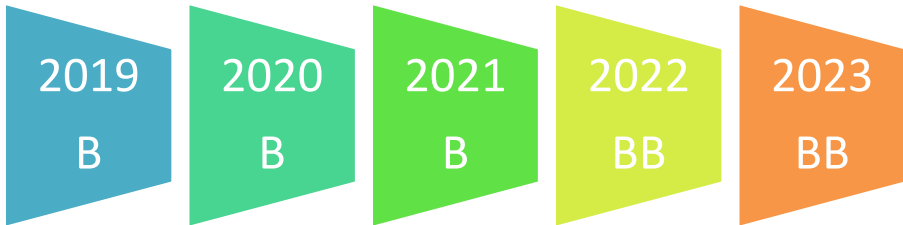
Tujuan
Meningkatnya
kualitas hidup
dan kesejahteraan
masyarakat



Misi Kedua :
Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional,
akuntabel dan transparan

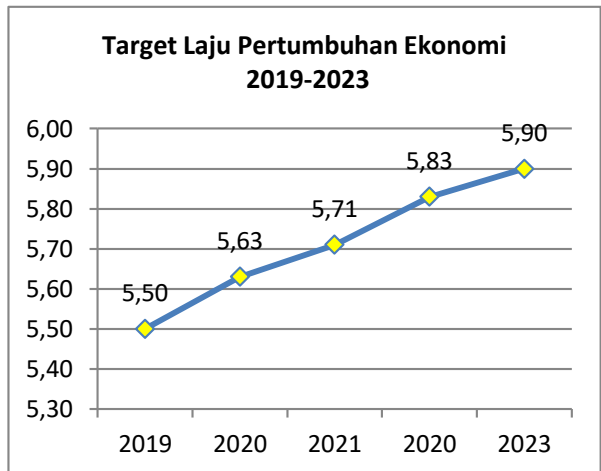
Tujuan
**Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih,
inovatif, profesional, akuntabel dan transparan**

INDEK REFORMASI BIROKRASI

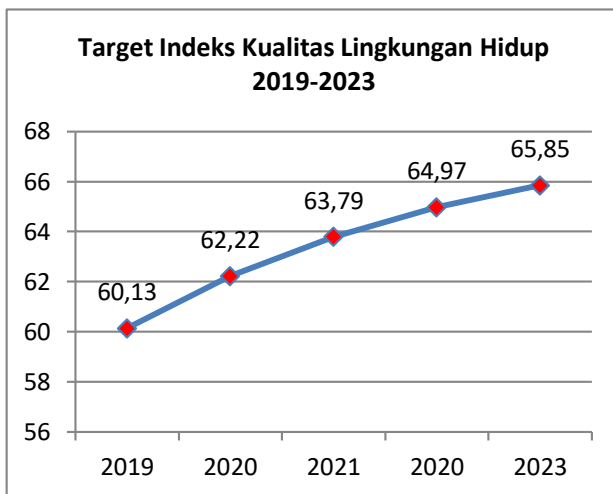


Misi Ketiga :
Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan,

Tujuan Kesatu
**Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi**



***Tujuan Kedua
Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan
Hidup***



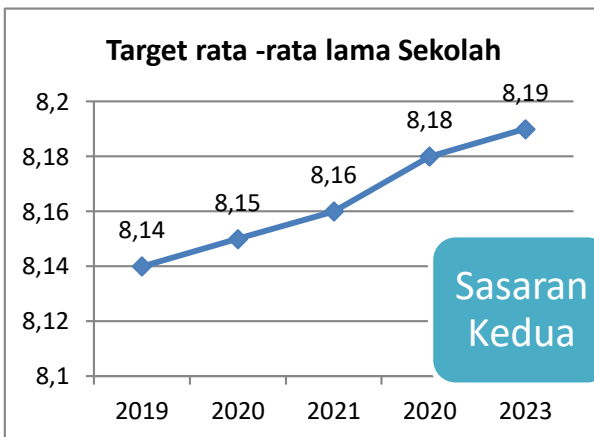
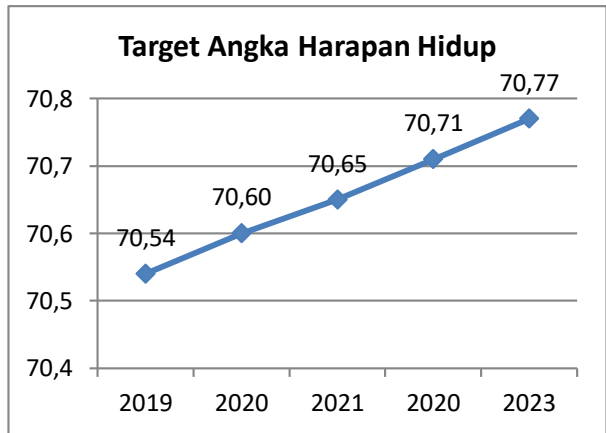
Sasaran

Ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan Kesatu pada Misi Kesatu : Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.



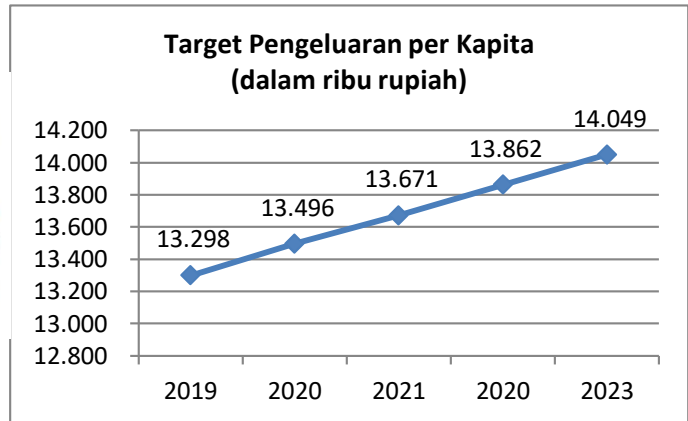
Sasaran Kedua

- Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat



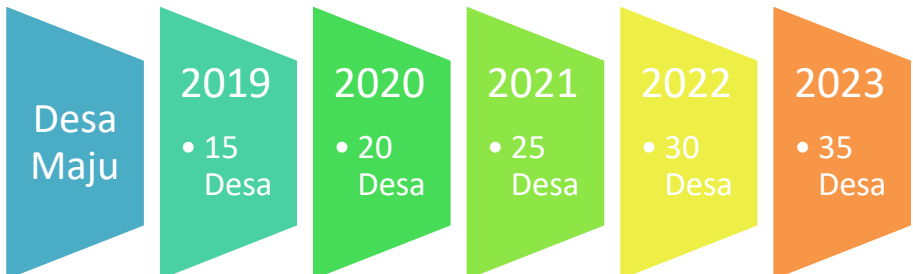
Sasaran Ketiga

- Meningkatnya Daya Beli Masyarakat



Sasaran Keempat

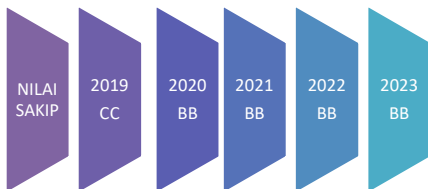
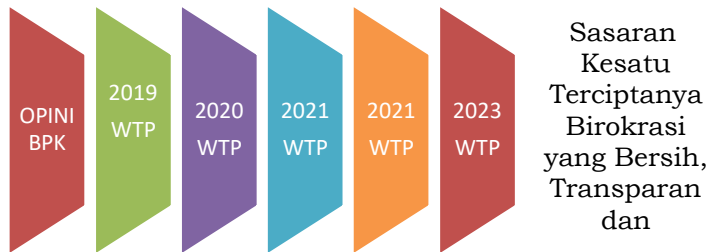
- Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan



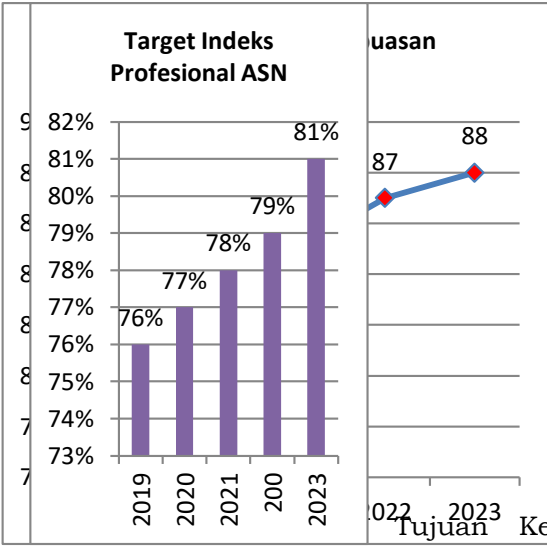


Akuntabel

Tujuan Kesatu pada Misi Kedua : Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

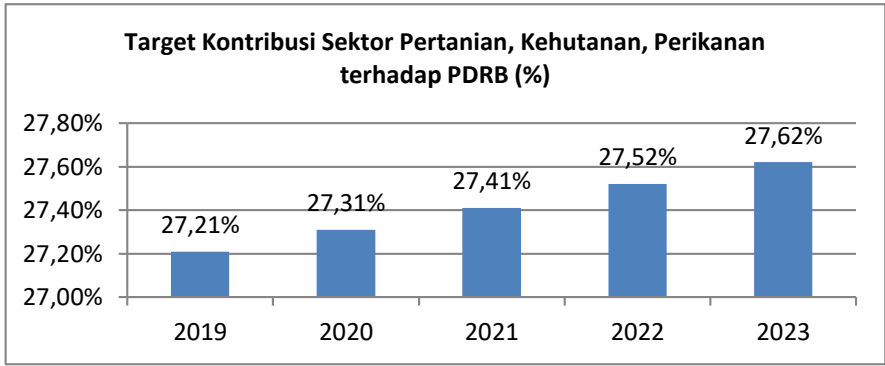


Sasaran Ketiga Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.



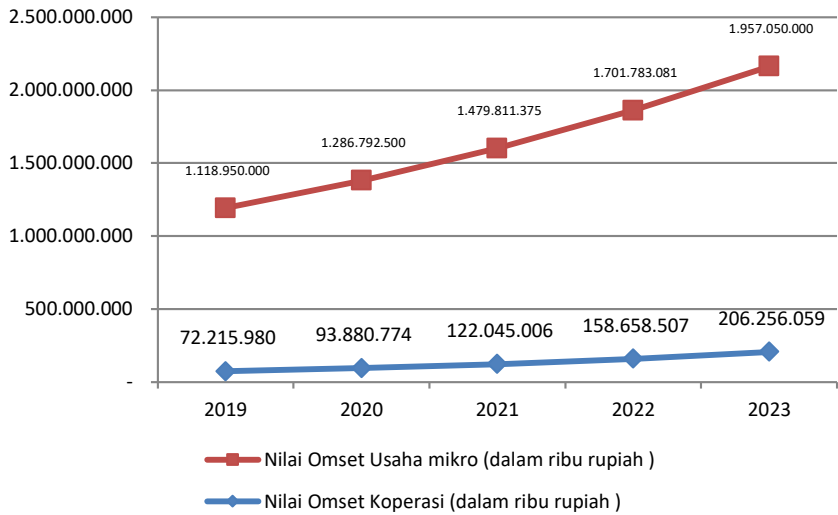
Tujuan Kesatu pada Misi Ketiga :
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Kesatu
Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan.

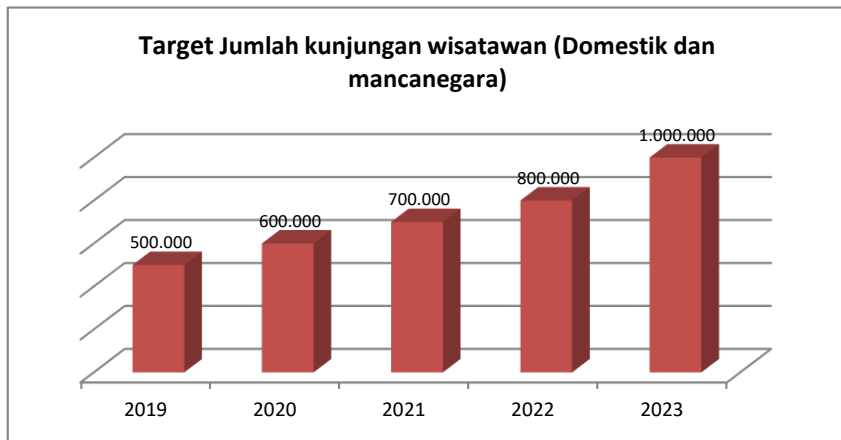


Sasaran Kedua
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro.

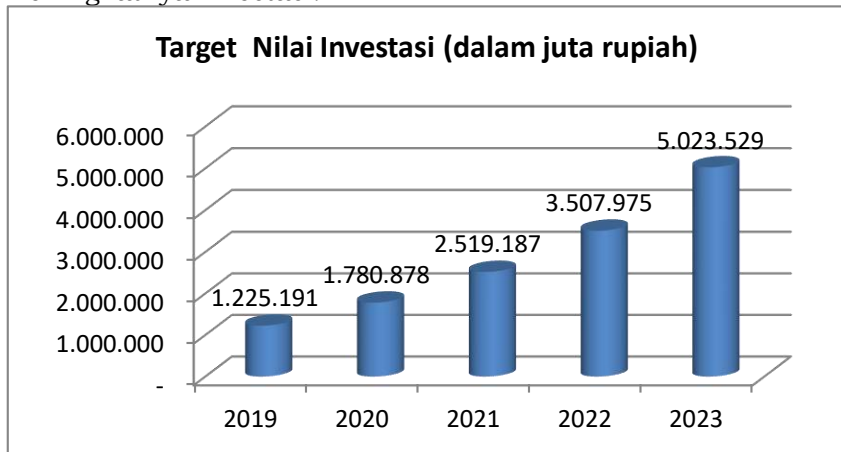
Target Nilai Omset Koperasi dan Usaha Mikro



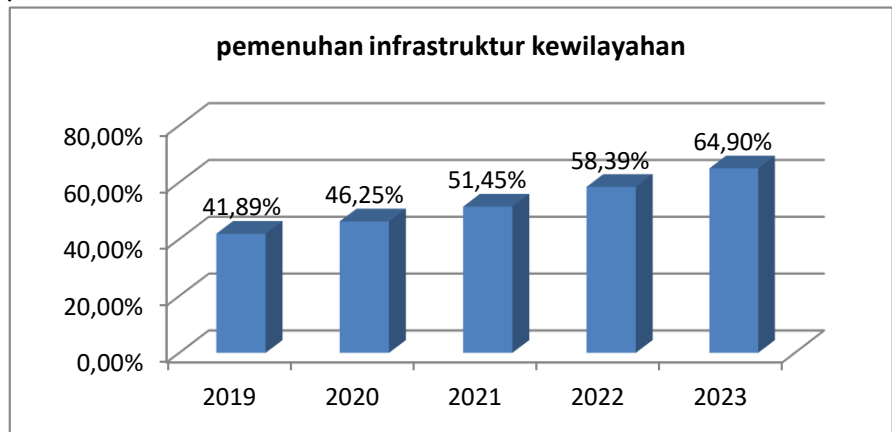
Sasaran Ketiga
Meningkatnya pengembangan pariwisata.



Sasaran Keempat
Meningkatnya investasi.

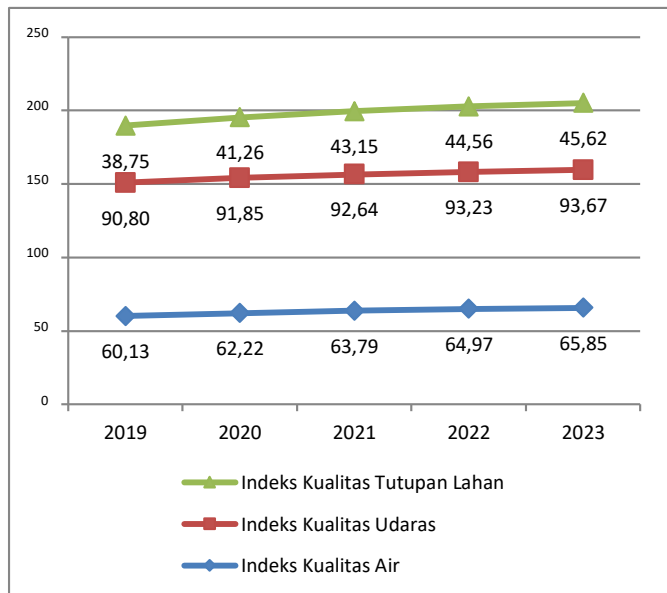


Sasaran Kelima
Meningkatnya infrastruktur kewilayahan



Tujuan Kedua pada Misi Ketiga : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut :

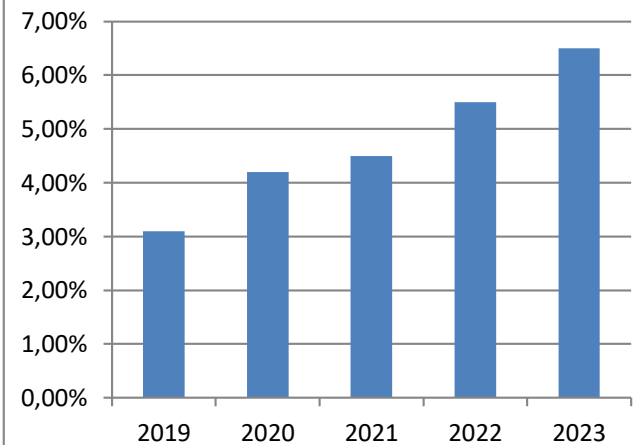
Sasaran
Kesatu
Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan
Air, Udara dan
Tutupan
Lahan



Sasaran Kedua
Meningkatnya
pengelolaan
sampah.



Target Cakupan Pelayanan Persampahan



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berupa rumusan perencanaan komprehensif berisi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah dan perangkat daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan serta target kinerja RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan

Arah kebijakan

merupakan pedoman yang berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mengarahkan perumusan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran secara bertahap selama kurun waktu lima tahun

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
T.1 Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	S1.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1 Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu
		1.2 Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat	1. Meningkatkan Desa <i>Open Defecation Free (ODF)</i> atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) 2. Pengurangan kawasan kumuh 3. Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			makanan sehat dan bergizi 5. Menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular 6. Penurunan kasus gizi buruk dan <i>stunting</i> 7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolahraga 8. Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga
		1.3 mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Menurunkan jumlah perkawinan usia muda 2. Meningkatkan program Keluarga Berencana (KB)
	S2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2.1 Meningkatkan akses pendidikan	1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah 2. Meningkatkan akreditasi sekolah (SD dan SMP) 3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal 4. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak 5. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan 6. Meningkatkan pemerataan sebaran guru
	S3. Meningkatnya daya beli masyarakat	3.1 Perluasan kesempatan kerja	1. Meningkatkan ketrampilan pencari kerja di bidang pariwisata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin
		3.2 Mengurangi beban pengeluaran	1. Pemenuhan jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin 2. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi 3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS 4. Meningkatkan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial
	S4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	4.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender 2. Meningkatkan peran kelembagaan di desa
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
T1. Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	S1. Terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan	1.1 Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi 2. Meningkatkan tata kelola asset dan pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			teknologi informasi 3. Menerapkan <i>e-budgeting</i> yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah
		1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Menerapkan <i>e-planning</i> dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi
		1.3 Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah	1. Meningkatkan pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 3. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	S2. Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur	1. Meningkatkan kinerja pegawai berbasis teknologi 2. Penataan manajemen sumber daya aparatur
	S3. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	yang berkualitas		pemerintahan pelayanan publik 2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik 3. Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 4. Meningkatkan pelayanan publik 5. Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa 6. Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi 7. Menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik 8. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat 9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan 10. Meningkatkan pembinaan dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 11. Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan 12. Meningkatkan pelayanan kemetrolagian dan perlindungan konsumen 13. Menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting
Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
T1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	S1. Meningkatnya pengembangan pariwisata	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata 2. Meningkatkan pengelolaan Geopark Belitung dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN, KEK, KPPN dan lainnya) berbasis masyarakat 3. Pengembangan Desa Wisata sesuai dengan potensi desa 4. Peningkatan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5. Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata 6. Pelestarian adat istiadat, rumah adat dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai warisan budaya 7. Meningkatkan pengelolaan museum maritim
	S2. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	2.1 Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian 2. Mengembangkan produksi pertanian di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik 3. Meningkatkan pengelolaan pasca panen dan mutu produksi 4. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan 5. Penguatan kelembagaan pertanian
		2.2 Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya	1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya 2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan 3. Pengembangan pembibitan budidaya laut 4. Mengembangkan produksi perikanan di Kawasan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik
	S3. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro	1. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri 2. Meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro
	S4. Meningkatnya investasi	Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri	1. Meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif 2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi 3. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah 4. Penataan peruntukan kawasan industri 5. Menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas Industri Kecil Menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan 6. Menumbuhkan sentra-sentra industri kecil

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan
	S5. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	5.1 Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah	1. Meningkatkan konektivitas antar pulau 2. Mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata 3. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur marina 4. Meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan 5. Meningkatkan pengelolaan jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah (PHD) 6. Mendorong percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang 7. Meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten 8. Meningkatkan pemenuhan penerangan jalan umum yang estetik dan fungsional 9. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan pelabuhan dan pembangunan lainnya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			10. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang 11. Meningkatkan keselamatan transportasi 12. Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi
		5.2 Pemenuhan kebutuhan air baku	1. Meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber air baku
T2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	S1. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	S2. Meningkatnya pengelolaan sampah	Meningkatkan pengelolaan persampahan	1. Meningkatkan ketersediaan kontainer sampah untuk penampungan sampah sementara 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 3. Meningkatkan perencanaan pengelolaan persampahan 4. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan 5. Meningkatkan pengolahan TPA berbasis 3R 6. Mengurangi penggunaan kemasan plastik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			sekali pakai di masyarakat

Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dengan pendekatan *holistik-tematik*, *integratif* dan *spasial*, merupakan program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dan erat kaitannya dengan visi dan misi dan capaian sasaran pembangunan daerah yang dielaborasi dalam visi, misi dan 16 (enam belas) program inovatif kepala daerah

Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah

